BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019

KABUPATEN SELUMA

RABU,27 NOVEMBER 2019

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Usut Temuan BPK di Setwan dan PUPR

Kasat Reskrim: Kita Akan Koordinasi ke Inspektorat

SELUMA - Polres Seluma memastikan temuan BPK di dua OPD Pemkab Seluma, Dinas PUPR dan Sekretariat DPRD dibawa ke ranah hukum. Sebelum melakukan pengusutan lebih lanjut, penyidik Tipidkor Sat Reskrim Polres Seluma terlebih dulu koordinasi ke Inspektorat Seluma.

"Kita tanggapi dan tentu akan diproses lebih lanjut terkait dua OPD yang belum menuntaskan pengembalian temuan BPK ini," ujar Kapolres Seluma, AKBP. I Nyoman Merthadana, S.Ik melalui Kasat Reskrim AKP. Rizka Fadhilah, SH, S.Ik.

Dijelaskan Rizka, koordinasi yang akan dilakukan ini terkait data hasil audit BPK tersebut. Data ini nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan pengusutan temuan yang belum selesai dikembalikan oleh Setwan dan Dinas PUPR Seluma. "Kita hargai kinerja rekan jurnalis, tapi untuk melakukan pengusutan tetap harus berkoordinasi dengan Inspektorat Seluma," kata Rizka.

Sebenarnya kata Rizka pihaknya telah lebih dulu menangani masalah ini. Langkah awal yang mereka lakukan adalah mengupayakan seluruh temuan audit BPK atas realisasi belanja di enam OPD tahun anggaran 2018, dapat dikembalikan. Hanya saja dari OPD, dua diantaranya belum tuntas melakukan pengembalian kerugian negara, yakni Setwan DPRD dan PUPR Seluma. Nilainya juga cukup besar mencapai Rp 1,5 miliar yang belum kembali. "Ini uang negara, jadi harus dikembalikan agar dapat dipergunakan kembali untuk pembangunan. Kita telah memfasilitasi agar temuan itu dapat dikembalikan semua. Ternyata hingga berakhirnya batas waktu, masih dua OPD yang belum tuntas lakukan pengembalian," jelasnya.

Sementara itu Kadis PUPR Seluma, M. Saifullah, SE, ST mengatakan pihaknya telah berkerjasama dengan Kejari Seluma untuk mengembalikan semua temuan tersebut sesuai dengan jumlahnya. Kerja sama dituangkan dalam Surat Kesepakatan Kerjasaman (SKK).

Dia juga membantah pernyataan Inspektur Inspektorat Seluma, Drs. Ramlan Fahmi yang mengatakan Dinas PUPR baru mengembalikan Rp 665, 7 juta dari Rp 1, 013 miliar. Atau masih tersisa Rp 434,6 juta. "Sudah dilakukan pengembalian. Saat ini tinggal menyisakan Rp 200 juta lagi yang belum dikembalikan oleh pihak rekanan. Namun semua telah berjanji untuk menuntaskannya, sehingga kami optimis temuan ini akan tuntas sebelum tutup tahun 2019 ini," tukasnya.

Sedangkan Sekretaris DPRD Seluma, Eddy Soepriady, M.Si belum dapat dikonfirmasi terkait hal ini. Dihubungi melalui ponselnya juga pesat Whatsaap (WA) belum didapat jawaban hingga berita ini disusun.

Terpisah, Waka I DPRD Seluma, Sugeng Zonrio, SH menyampaikan bahwa untuk temuan audit BPK di Sekretariat DPRD Seluma telah ditindaklanjuti oleh Setwan sesuai dengan besaran temuan tersebut. "Saya sudah tanya ke Bagian Persidangan Setwan, katanya sudah tuntas dikembalikan. Tapi yang jelas kita akan tindaklanjuti. Jika memang sudah dikembalikan berarti selesai. Namun jika memang belum tuntas kita akan pinta sekretariat untuk menuntaskannya sesuai dengan besaran temuan yang belum dikembalikan tersebut," pungkas Sugeng.

Sebagaimana dilansir RB kemarin (26/11) Inspektur Inspektorat Seluma, Drs. Ramlan Fahmi mengatakan untuk Setwan dari Rp 1,6 miliar temuan BPK baru Rp 498,3 juta dikembalikan. Untuk Dinas PUPR telah mengembalikan sebesar Rp 665, 7 juta dari Rp 1,013 miliar. "Kalau empat OPD lainnya telah tuntas lakukan pengembalian. Tinggal dua OPD ini. Karena itu kami persilakan penegak hukum, baik Polres maupun Kejari Seluma bila ingin menindaklanjuti temuan ini ke proses hukum," jelas Ramlan waktu itu.

Total temuan BPK tahun 2019 atas realisasi belanja tahun 2018 di enam OPD Pemkab Seluma mencapai Rp 2,8 miliar lebih. Jumlah tersebut baru dikembalikan sebesar Rp 1,3 miliar atau belum mencapai 50 persen. "Sisa temuan yang belum dikembalikan ini di dua OPD tersebut, yang bila ditotalkan mencapai Rp 1,5 miliar," uca Ramlan.

Di Setwan Seluma terdapat temua di dua item kegiatan yakni pada belanja makan dan minum sejumlah Rp 1, 246 miliar dan biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 428,043 juta. Sementara untuk Dinas PUPR terdapat di delapan item belanja. Yakni pekerjaan peningkatan jalan, peningkatan daerah irigasi (DI) dan pembangunan gedung islamic centre yang totalnya mencapai Rp 1, 013 miliar. "Sebelumnya kita telah ingatkan kedua OPD ini. Tapi masih belum juga menuntaskan, sehingga kami persilahkan APH mengusutnya," ujar Ramlan.(**aba**)